

**STRATEGI PERENCANAAN BADAN KESWADAYAAN
MASYARAKAT (BKM) MELALUI PROGRAM KAMPUNG
WISATA TANI (STUDI KELURAHAN TEMAS
KECAMATAN BATU KOTA BATU)**

Yules Umbu Laiya Sobang

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Uvifersitas Tribhwana Tungadewi Malang

Email: laiayules@gmail.com

Abstract: Community empowerment in tourism planning strategies is very necessary and needed because development is very minimal and very little is done by looking at the function of a main focus, empowerment by seeing strength and ability. The purpose of this study was to find out the strategy for forming the Community Self-Help Agency (BKM) in Temas Village, to find out the planning strategy of the Community Self-Reliance Agency (BKM) through a farm tourism village program in Temas Village. This research is a qualitative descriptive study. Data sources use primary sources and secondary sources. The technique of determining the informants used was purposive sampling which was applied to the heads of the village of Temas, Secretary of the Temas Village, Kasi Community Empowerment and Development of the Temas Village and the Head of the BKM Section of Temas Village. Methods of data collection using interviews, observation and documentation. The process of data analysis includes: data reduction, data presentation and conclusion drawing. To test the validity of the data, the researchers used triangulation techniques. The results of the study show that the BKM consists of community members whose commitment is recognized. The strategy concept of the Community Welfare Institution in the development and tourism tourism village program is in accordance with the 2017 Head of Village Decree, The planning strategy of the farm tourism village is carried out by the Community Self-Reliance Agency (BKM) by looking at the natural potential in Temas. This planning strategy is carried out to empower the community of Temas Village or in other words to prosper the Temas Village community.

Keywords: Planning, BKM, Farm Tourism Village

Abstrak: Pemberdayaan masyarakat dalam strategi perencanaan wisata sangat di perlukan dan di butuhkan karena pemberdayaan pembangunan sangat minim dan sangat kurang dilakukan dengan melihat fungsi suatu fokus utama, pemberdayaan dengan melihat kekuatan dan kemampuan. Tujuan Penelitian ini yaitu, mengetahui strategi pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kelurahan Temas, mengetahui strategi perencanaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) melalui program kampung wisata tani di Kelurahan Temas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah *purposive sampling* yang diberlakukan untuk Kepala kelurahan Temas, Sekretaris Kelurahan Temas, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kelurahan Temas dan Kepala bagian BKM Kelurahan Temas. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses analisis data meliputi: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data maka peneliti menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) BKM beranggotakan warga komunitas yang diakui komitmennya. Konsep strategi Badan Keswadayaan Masyarakat dalam pembangunan dan program kampung wisata tani yaitu sesuai dengan Keputusan Lurah tahun 2017, 2) Strategi perencanaan kampung wisata tani dilaksanakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan melihat potensi alam yang ada di Kelurahan Temas. Strategi perencanaan ini dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat Kelurahan Temas atau dengan kata lain untuk mensejahterakan masyarakat Kelurahan Temas.

Kata Kunci: Perencanaan, BKM, Kampung, Wisata Tani

PENDAHULUAN

Perencanaan strategi dalam kehidupan di negara modern saat ini kegiatan pembangunan termasuk pembangunan kepariwisataan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya sebuah kebijakan yang baik pula. Kebijakan yang baik dapat di ilustrasikan seperti seorang dirigen yang mampu mengatur permainan sebuah orchestra yang terdiri dari banyak pemain musik memakainya, sehingga menghasilkan sebuah lagu yang sangat indah, dengan setiap insan pariwisata dan terlebih lagi para birokrat baik di lingkungan pemerintah maupun pemerintah daerah harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menyusun dan mengimplematisasikan kebijakan yang baik dalam kegiatan kepariwisataan. tinjau dari kebutuhan praktis.

Pembahasan tentang kebijakan pembangunan kepariwisataan yang sering kali tidak di perhatikan orang yang mendengar adanya kebijakan pembangunan kepariwisataan pada umumnya secara otomatis akan memfokuskan perhatiannya kepada aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan kepariwisataan. dengan hal itu pembangunan kepariwisataan dengan di definisikan sebagai kepandain, kemahiran kebijaksanaan, rangkai konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak kepada pemerintah dan organisasi, pada prinsip adalah parameter yang yang di jadikan dasar atau pedoman untuk melaksanakan sebuah aktivitas yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan kebijakan juga meliputi peraturan perundang-undangan dalam hubungannya dengan tugas pemerintahan. Menurut Edgell dan swanson (2013) pemahaman mengenai kebijakan di bidang kepariwisataan akan menjadi lebih mudah jika di mulai dari definisi Thomas Dye mengenai kebijakan publik yaitu tindakan apapun melakukan atau tidak melakukan yang dipilih oleh pemerintah.

Pengembangan kepariwisataan pertama dengan melakukan perencanaan kegiatan pariwisata dengan melihat keadaan lingkungan dan dampak dalam perencanaan pembangunan, pendapat Arif (2006 : 149-150) tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, jadi sudah selayaknya masyarakat terlibat dalam proses pembangunan. Sebagaimana dalam Permendagri No. 114 pasal 1 ayat 9.

Pembangunan kelurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kelurahan. sesuatu hal ini di karenakan sering terjadi ketidakadilan dan kesejahteraan dalam pembangunan kepariwisataan, perencanaan dalam pengembangan dan pertumbuhan kepariwisataan tidak berjalan berjalan saling bersinergitas secara normal adanya keadilan yang mementingkan diri sendiri, dan tidak melihat dampak yang baik jika adanya pariwisata dan harus mengakomodasi kepentingan semua pihak termasuk pihak pengelola pihak masyarakat setempat pihak pemerintah serta pihak lain secara luas berkepentingan dengan perkembangan kefiataan wisata.selain membuat perencanaan pengembangan kegiatan pariwisata di atas untuk mengelola perlu adanya kerja sama dengan pihak pemerintah pusat mengadakan penelitian mengenai berbagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2014:9) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian yakni: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu dengan fokus penelitian ini adalah strategi perencanaan dan monitoring badan keswadayaan masyarakat (BKM) melalui program pembangunan kampung wisata tani yang meliputi: Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber

data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat penggabungan dari berbagai teknik pengumpulan data yang ada, diantaranya melalui: observasi, interview dan dokumentasi (Sugiyono, 2013:241). Teknik sampel yang diambil peneliti yaitu *purposive sampling* dimana teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011:80-85). dalam penelitian ini yang menjadi informasi diantara lain: 1) Kepala kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, 2 Sekretaris Kelurahan Temas, 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kelurahan Temas, 4) Kepala bagian BKM Kelurahan Temas.

Seluruh data yang terkumpul kemudian diperoleh oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang di dapatkan selama proses peneliti. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246), mengungkapkan bahwa dalam mengelola data kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data maka peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kelurahan Temas

Menurut Soetomo (2012) BKM sebagai institusi lokal yang dibentuk melalui program PNPM di desain sebagai institusi sukarela. Dengan demikian, proses dan pembentukannya tidak banyak campur tangan pemerintah. Dibanding dengan program pemerintah yang lain, program ini lebih kental dengan nuansa pendekatan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Konsep strategi BKM dalam pembangunan dan program kampung wisata tani di Kelurahan Temas yaitu sesuai dengan Keputusan Lurah tahun 2017 yaitu merumuskan tentang kebijakan aturan main, mengorganisir masyarakat untuk bersama-sama merumuskan misi, memonitoring, mengawasi, mengendalikan pelaksanaan keputusan dari Badan Keswadayaan Masyarakat, mendorong terampungnya proses pembangunan partisipatif dan klasifikasi penilaian dilakukan oleh unit pelaksana, memonitor mengawasi dan memberi masukan, membangun transparansi dan lain sebagainya.

BKM beranggotakan warga komunitas yang diakui komitmennya, seperti perwakilan warga RT/RW, perwakilan organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok perempuan (PKK), tokoh masyarakat atau tokoh agama. unsur aparatur daerah misalnya LKMD, dapat berpartisipasi dalam BKM dalam kapasitas pribadi. Pimpinan BKM harus dipilih dari dan oleh anggotanya.

Adapun prinsip dan nilai yang dijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan dan dilestarikan oleh BKM Temas yaitu:

- a. Demokrasi: dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin, mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif dan demokratis.
- b. Partisipasi: dalam tiap langkah kegiatan dilakukan secara partisipatif, melibatkan segenap komponen masyarakat, khususnya kelompok masyarakat rentan yang selama ini tidak memiliki peluang dalam program dan kegiatan setempat, sehingga mampu membangun rasa kepemilikan dan proses belajar melalui mekanisme bekerja sama.
- c. Transparansi dan akuntabilitas: dalam proses manajemen organisasi masyarakat harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat belajar dan melembagakan sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakannya.

- d. Desentralisasi: dalam proses pengambilan keputusan yang langsung menyangkut kehidupan dan penghidupan masyarakat agar dilakukan sedekat mungkin dengan pemanfaat pada masyarakat sendiri, sehingga keputusan yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Strategi Perencanaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Melalui Program Kampung Wisata Tani di Kelurahan Temas

Dasar strategi perencanaan kampung wisata tani yaitu dilaksanakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) untuk memberdayakan masyarakat sekitar khususnya masyarakat Kelurahan Temas dengan mengambil potensi dasar yang ada di Kelurahan Temas.

Menurut Suhendra (2006) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan bahwa masyarakat diberi kuasa agar mampu berkuasa atas kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep yang menekankan pada pembangunan ekonomi pada mulanya yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai masyarakat. Konsep ini menekankan pada peran serta masyarakat. Dalam Suharto (2005) tujuan utama pemberdayaan memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal misalnya persepsi mereka sendiri maupun kondisi eksternal misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil.

Klasifikasi perencanaan BKM dalam pembangunan KWT adalah perencanaan yang berbasis pemberdayaan dan bertujuan untuk membangun lingkungan sekitar. Dalam merumuskan perencanaan kampung wisata tani, semua unsur masyarakat terlibat karena ini adalah kehendak dan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, tetap ada kerjasama antara pihak kelurahan, BKM, dan unsur masyarakat mulai dari perencanaan, pembangunan dan sebagainya.

Tujuan daya wisata KWT adalah memberi edukasi yang baik terkait lingkungan yang baik dan penanganan tanaman organik di wilayah Kelurahan Temas. Selain itu Tujuan wisata KWT ini juga sesuai dengan program yang dicanangkan oleh program PLPBK dimana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Temas atau dengan kata lain dapat memberdayakan masyarakat Kelurahan Temas.

Pembangunan Kampoeng Wisata Tani dilaksanakan melalui proses penggalian gagasan yang cukup panjang, dari proses itu maka lahirlah beberapa usulan yang akan mewakili kebutuhan masyarakat, yang selanjutnya akan diranking sesuai dengan skala kebutuhan masyarakat dan dimusyawarahkan dalam musyawarah tingkat desa. PLPBK dan PNPM-MP program Kampoeng Wisata Tani (KWT) merupakan program yang mempunyai transparansi yang baik serta mengupayakan keterlibatan sepenuhnya masyarakat di dalam proses pelaksanaannya.

Indikator pemberdayaan masyarakat di KWT yaitu adanya BKM. BKM sebagai mitranya kelurahan dalam program pemberdayaan masyarakat turut ikut serta dalam membantu program-program kelurahan. Secara langsung BKM melalui program kampung wisata tani memberikan fasilitas misalnya dari pihak masyarakat yang mempunyai usaha oleh-oleh bisa diberi fasilitas sehingga mendapat tambahan penghasilan. Sedangkan secara tidak langsung BKM melalui program kampung wisata tani dapat membantu masyarakat berupa alokasi dana untuk membantu masyarakat yang sedang mengadakan pembangunan bedah rumah dan memberikan santunan kepada fakir miskin.

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa penghambat dalam strategi perencanaan BKM melalui program kampung wisata tani yaitu:

- a. Posisi aset tanahnya merupakan aset pemerintah kota sedangkan aset bangunannya waktu itu masih dari pemerintah pusat.
- b. Terbatasnya anggaran
- c. Kurangnya keterlibatan dari instansi atau dinas terkait untuk mendukung pembangunan di kampung wisata tani

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: BKM beranggotakan warga komunitas yang diakui komitmennya. Konsep strategi Badan Keswadayaan Masyarakat dalam pembangunan dan program kampung wisata tani yaitu sesuai dengan Keputusan Lurah tahun 2017. Strategi perencanaan kampung wisata tani dilaksanakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan melihat potensi alam yang ada di Kelurahan Temas. Strategi perencanaan ini dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat Kelurahan Temas atau dengan kata lain untuk mensejahterakan masyarakat Kelurahan Temas. Secara khusus tujuan daya wisata kampung wisata tani adalah memberi edukasi yang baik terkait lingkungan yang baik dan penanganan tanaman organik di wilayah Kelurahan Temas.

DAFTAR PUSTAKA

- LPM UDM. 2008. *Kuliah Kerja Nyata- Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat*.
Peraturan Pemerintah Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Keperiwisataan.
- Soetomo .2012. *Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri*. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2004. *Motode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2011. *Metode Penelitan Kuantitaif Dan Kualitaif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitan Kuantitaif Dan Kualitaif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Suhendra. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Aministrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.
- UU RI 23 TAHUN 2014 Tentang Pemerintah Daearah